PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(P - RENJA)

TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut P - Renja Bakesbangpol, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka kebijakan, program, kegiatan pembangunan dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P - RKPD) Kota Pasuruan.

Mengingat pentingnya peranan Renja Bakesbangpol dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan, maka diperlukan pedoman penyusunan Renja Bakesbangpol untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi bahwa dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ini menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai pedoman teknis/operasional dalam penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diharapkan proses penyusunan dan substansi dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan Rencana Kerja PD dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan dalam mewujudkan stabilitas politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang.

Pasuruan, 25 Juni 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pasuruan

Drs. H. MOKHAMAD FAQIH, M.si
Pembina Utama Muda
NIP. 196660622 199103 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii
BAB I. PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan..... 3
BAB II. EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025..... 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai TW I Tahun 2025..... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK..... 17
BAB IV PENUTUP..... 25

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kota Pasuruan..... 6

TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perubahan Rencana Keraja 2025 Kota Pasuruan... 16

TABEL 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P - Renja PD), dalam hal ini Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran yang lebih teknis dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renstra Bakesbangpol). Renstra Bakesbangpol adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (P – Renja Bakesbangpol) Kota Pasuruan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan PD menyusun Perubahan Rencana Kerja. P-Renja Bakesbangpol dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada P-RKPD, Renstra Bakesbangpol, RPJMD dan RPJPD.

Penyusunan rancangan P – Renja Bakesbangpol merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen P-Renja Bakesbangpol yang definitif. Penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan P - Renja Bakesbangpol;dan
2. Tahap penyajian rancangan P - Renja Bakesbangpol.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan P - Renja Bakesbangpol mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal P-RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan P-Renja Bakesbangpol dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal P-RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bakesbangpol, evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bakesbangpol. P-RKPD (Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) merupakan pedoman penyusunan RAPBD Perubahan dimana RAPBD Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Perubahan Rencana Kerja PD.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun ke empat periode tahun 2021 – 2025 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dokumen tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai macam permasalahan, tantangan, serta

lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal melaksanakan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 - 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi , Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 ;
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan koordinasi, mediasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota Pasuruan dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan (Tribulan IV). Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan periode tahun 2021 – 2025.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2025 adalah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2025 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Keputusan Walikota

Keputusan Kepala PD

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang P-Renja Bakesbangpol, proses penyusunan P-Renja, keterkaitan antara P-Renja Bakesbangpol dengan dokumen P-RKPD dan Renstra Bakesbangpol, dan tindak lanjut dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran P- Renja Bakesbangpol.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P-Renja Bakesbangpol.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan P-Renja Bakesbangpol serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sampai Triwulan II Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol (program dan kegiatan) sampai Triwulan I Tahun 2025 yang mengacu pada APBD tahun 2025 dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bakesbangpol. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol sampai Triwulan II dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bakesbangpol.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bakesbangpol berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB IV : PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

Serta dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama dan tanda tangan kepala Bakesbangpol juga cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sampai Triwulan I Tahun 2025

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 ini dapat kita lihat evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sampai Triwulan I Tahun 2025 dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tabel 2.1. Dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pasuruan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi melalui 6 (enam) program dengan 13 (Tiga belas) kegiatan, dan 34 (Tiga puluh empat) sub kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2021 – 2025. Keberhasilan pencapaian sasaran ini jika dihitung indikator keberhasilannya, ada yang belum seluruhnya telah mencapai 100 % karena kegiatan tersebut masih berlangsung pada tahun berjalan, yaitu tahun 2025.

Adapun faktor pendorong dalam keberhasilan kinerja pada tahun 2025 adalah :

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
b. Terjalinnya koordinasi yg baik antar pegawai maupun lintas PD
c. Adanya komitmen dan dukungan SKPD untuk berakuntanbilitas

Serta faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pada tahun 2025 adalah :

a. Pelaksanaan kinerja kurang sesuai dengan SOP
b. Masih kurangnya rapat evaluasi internal bidang

Berikut rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan pencapaian Renstra s/d TW I Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025
Kota Pasuruan
PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / UNIT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT SUB KEGIATAN)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) PADA TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Bakesbangpol s/d tahun berjalan			
						Target RENJA Bakesbangpol Tahun 2025	Realisasi RENJA Bakesbangpol Tahun 2025 (Sampai TW I)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	
					K	K	K	K	K	Rp	K	Rp
1	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang yang terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100	65,96		65,96%	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100	63,64		63,64%	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40,00	6,00	2,00	33,33	22,69		56,73%	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	12,00	5,00	1,00	20	119,40		100,00%	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8,00	1,00		0	151,85		100,00%	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100	54,57		54,57%	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22,00	20,00	20,00	100	20,00		90,91%	

No.	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / UNIT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT SUB KEGIATAN)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) PADA TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Bakesbangpol s/d tahun berjalan			
						Target RENJA Bakesbangpol Tahun 2025	Realisasi RENJA Bakesbangpol Tahun 2025 (Sampai TW I)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	
					K	K	K	K	K	Rp	K	Rp
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	44,00	17,00	13,00	76,47	0,00		0,00%	
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100	34,00		34,00%	
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	48,00	4,00	1,00	25	51,42		100,00%	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Persen	100,00	100,00	100,00	100	11,33		11,33%	
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	28,00	4,00	2,00	50	27,00		96,43%	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100	67,33		67,33%	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4,00	2,00		0	4,00		100,00%	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4,00	12,00	3,00	25	148,54		100,00%	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	48,00	1,00	1,00	100	1,00		2,08%	
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1,00	1,00	0,00	0	161,29		100,00%	

No.	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / UNIT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT SUB KEGIATAN)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) PADA TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Bakesbangpol s/d tahun berjalan			
						Target RENJA Bakesbangpol Tahun 2025	Realisasi RENJA Bakesbangpol Tahun 2025 (Sampai TW I)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	
					K	K	K	K	K	Rp	K	Rp
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	48,00	12,00	3,00	25	10,00		20,83%	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	388,00	12,00	3,00	25	74,67		19,24%	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	100,00	0,00	0	1,00		1,00%	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	64,00	7,00	0,00	0	19,00		29,69%	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100	37,67		37,67%	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	12,00	3,00	25	88,00		100,00%	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48,00	12,00	3,00	25	165,00		100,00%	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100	62,92		62,92%	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	32,00	1,00	1,00	100	1,00		3,13%	

No.	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / UNIT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT SUB KEGIATAN)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) PADA TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Bakesbangpol s/d tahun berjalan			
						Target RENJA Bakesbangpol Tahun 2025	Realisasi RENJA Bakesbangpol Tahun 2025 (Sampai TW I)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	
					K	K	K	K	K	Rp	K	Rp
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	7,00	7,00	7,00	100	7,00		100,00%	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	unit	84,00	19,00	0,00	0	0,00		0,00%	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantro dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4,00	1,00	1,00	100	111,00		100,00%	
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	10,00	10,00	0,00	0	23,69%		0,00%	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	Persen	3,00	3,00	0,00	0	11,67%		100,00%	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	6.800,00	60,00		0	9,00		0,13%	
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	3,00	1,00		0	18,00		100,00%	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan PASKIBRAKA	Jumlah PASKIBRAKA	Orang	74,00	74,00	74,00	100	0,00		0,00%	

No.	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / UNIT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT SUB KEGIATAN)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) PADA TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Bakesbangpol s/d tahun berjalan			
						Target RENJA Bakesbangpol Tahun 2025	Realisasi RENJA Bakesbangpol Tahun 2025 (Sampai TW I)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	
					K	K	K	K	K	Rp	K	Rp
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik	Persentase	20,00	20,00	0,00	0	39,13%		0,00%	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pemilih pemula yang dibina	Orang	1.785,00	255,00	0,00	0	300		0,88%	
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah ya	Dokumen	4,00	1,00	3,00	300	225,17		100,00%	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situas	orang	150,00	189,00		0	1.657,13		100,00%	

No.	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / UNIT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT SUB KEGIATAN)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) PADA TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Bakesbangpol s/d tahun berjalan			
						Target RENJA Bakesbangpol Tahun 2025	Realisasi RENJA Bakesbangpol Tahun 2025 (Sampai TW I)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	
					K	K	K	K	K	Rp	K	Rp
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	Persentase	3,00	3,00	4,40	146,6667	6,41%		0,00%	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	Persentase	40,00	40,00	0,00	0	73,45%		0,00%	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	320,00	185,00	0,00	0	2,00		0,63%	
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	620,00	40,00		0	7,41		1,20%	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	16,00	1,00		0	73,45		100,00%	
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase lembaga ekonomi,sosial dan budaya yang aktif	Persentase	20,00	20,00	63,00	315	47,09%		0,00%	

No.	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / UNIT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT SUB KEGIATAN)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) PADA TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Bakesbangpol s/d tahun berjalan			
						Target RENJA Bakesbangpol Tahun 2025	Realisasi RENJA Bakesbangpol Tahun 2025 (Sampai TW I)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	
					K	K	K	K	K	Rp	K	Rp
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	Persentase	85,00	85,00	88,89	104,5765	88,89%		0,00%	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	100,00	40,00		0	108,09		100,00%	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	7.000,00	400,00		0	201,89		2,88%	
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	LAporan	4,00	1,00		0	40,00		100,00%	
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik yang dimediasi	Persen	75,00	75,00	100,00	133,3	100 %		0,00%	

No.	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / UNIT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT SUB KEGIATAN)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) PADA TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Bakesbangpol s/d tahun berjalan			
						Target RENJA Bakesbangpol Tahun 2025	Realisasi RENJA Bakesbangpol Tahun 2025 (Sampai TW I)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	
					K	K	K	K	K	Rp	K	Rp
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan penanganan konflik	Persen	3,00	3,00	0,00	0	10,13%		100,00%	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konf	orang	42.872,00	3.750,00	555,00	14,8	1.923,00		4,49%	

No.	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / UNIT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT SUB KEGIATAN)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) PADA TAHUN 2025	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENJA TAHUN 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Bakesbangpol s/d tahun berjalan			
						Target RENJA Bakesbangpol Tahun 2025	Realisasi RENJA Bakesbangpol Tahun 2025 (Sampai TW I)	Capaian (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	
					K	K	K	K	K	Rp	K	Rp
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu melakukan kegiatan pemantauan orang asing, TKA asing dan lembaga asing	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Laporan	3,00	1,00	1,00	100	5,75		100,00%	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	1,00	1,00	100	0,00		0,00%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan Tujuan PD yaitu terwujudnya masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur pancasila. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tampak dalam Tabel 2.2 Terdapat 3 (tiga) indikator yang sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan Bakesbangpol Kota Pasuruan belum mempunyai indikator kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), NSPK dan IKK sebagai standar nasional.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Perubahan Rencana Keraja 2025
Kota Pasuruan

INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				REALISASI		TARGET P - RENJA		CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
Indeks Stabilitas	N/A	N/A	74,5%	76,05%	89%	89%	86,16%	89,68%	89%	89%	
Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	N/A	N/A	3%	3%	3%	8,3%	8,75%	4,28%	3%	8,3%	
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	N/A	N/A	75%	75%	85%	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	
Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	N/A	N/A	20%	20%	20%	21%	72,72%	19,44%	20%	21%	
Indeks Keharmonisan Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	59,83%	
Indeks Toleransi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,5%	
Indeks Keterlibatan Komunitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45 %	
Indeks Konflik Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45 %	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak luput dari Visi Misi Kota Pasuruan yaitu Visi : " PASURUAN KOTA ANUGRAH "

"Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya, Harmonis Sosial Budayanya, Indah Kotanya"

Misi :

1. Aktif Dalam Pelayanan Publik yang bersifat responsif, terjangkau dan berkualitas melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat
2. Menciptakan kohesifitas masyarakat yang harmonis dengan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif
3. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan
4. Memastikan peran kepemudaan dan kebudayaan yang terampil dan profesional yang berbasis pada prinsip inklusif dan religius untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kohesifitas Masyarakat
5. Memperindah kota yang megah dan nyaman melaluipenguatan infrastruktur, ekonomi dan sosial yang berkelajutan.

Menindaklanjuti :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2025
2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE 900.1.31/6629.A/SJ
3. SE/MK.07/2024 tentang Tindak lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025
4. Surat Edaran Wali Kota Pasuruan Nomor 903.1.1.4/276/423.201/ 2025 Perihal Pergeseran anggaran.
5. Surat dari KEMENDAGRI No. 200.6.2/e-374/Polpum tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah yang mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha.

Berdasarkan hal di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan melakukan efisiensi anggaran pada anggaran tahun 2025. Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah 6 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan pagu Rp 8.514.816.612. Pagu tahun 2025 setelah Perubahan adalah Rp 8.416.326.391. Pada bagian ini, dilakukan penyesuaian terhadap anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sebagai hasil dari evaluasi pelaksanaan anggaran sebelumnya, perkembangan kebutuhan prioritas, serta kondisi realisasi di lapangan.

Perubahan anggaran dilakukan baik dalam bentuk penambahan, pengurangan, maupun pergeseran antar komponen belanja, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perubahan yang signifikan yaitu perubahan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan mengalihkan sebagian anggaran ke sub kegiatan tersebut yang dinilai lebih mendesak atau strategis serta untuk menindaklanjuti Surat dari KEMENDAGRI No. 200.6.2/e-374/Polpum sebagaimana poin nomor 5 di atas. Sedangkan di tahun 2025 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PASURUAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM//KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**															
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
1	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang yang terfasilitasi	**100%**	**100%**	6.939.764.037	3.800.572.812	3.610.423.012	3.329.341.025							3.990.601.453	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	**100%**	**100%**	37.997.800	37.837.700	23.352.300	-14.645.500							39.729.585	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	33.473.100	33.313.100	22.134.100	-11.339.000	Kota Pasuruan	DAU					34.978.755	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	2.299.700	2.299.600	542.800	-1.756.900	Kota Pasuruan	DAU					2.414.580	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	2.225.000	2.225.000	675.400	-1.549.600	Kota Pasuruan	DAU					2.336.250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	**100%**	**100%**	6.067.302.787	2.985.654.562	3.006.406.441	-3.088.927.725							3.134.937.290	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	21 orang/bulan	6.011.958.187	2.954.435.662	2.982.407.041	--3.029.491.146	Kota Pasuruan	DAU					3.102.157.445	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	17 laporan	55.344.600	31.218.900	23.939.400	-31.405.200	Kota Pasuruan	DAU					32.779.845	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	**100%**	**100%**	40.923.600	35.352.900	33.373.800	-7.549.800							37.120.545	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM//KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	40.923.600	35.352.900	33.373.800	-7.549.800	Kota Pasuruan	DAU					37.120.545	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	**100%**	**100%**	1.800.000	1.800.000	967.500	-832.500							1.890.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	1.800.000	1.800.000	967.500	-832.500	Kota Pasuruan	DAU					1.890.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	**100%**	**100%**	157.101.900	152.173.400	77.230.000	-79.871.900							159.782.070	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	1 Paket	7.969.900	7.969.200	7.025.200	-944.700	Kota Pasuruan	DAU					8.367.660	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	6 Paket	19.927.800	15.000.000	6.603.500	-13.324.300	Kota Pasuruan	DAU					15.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.204.400	2.204.400	1.102.200	-1.102.200	Kota Pasuruan	DAU					2.314.620	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	4.000.000	-6.000.000	Kota Pasuruan	DAU					10.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	18.000.000	18.000.000	9.000.000	-9.000.000	Kota Pasuruan	DAU					18.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	98.999.800	98.999.800	49.499.100	-49.500.700	Kota Pasuruan	DAU					103.949.790	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	**100%**	**100%**	120.569.200	65.919.600	30.122.100	-90.447.100							69.215.580	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 Unit	2 Unit	120.569.200	65.919.600	30.122.100	-90.447.100	Kota Pasuruan	DAU					69.215.580	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	**100%**	**100%**	369.718.250	365.794.650	349.394.250	-20.324.000							384.084.383	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	93.068.200	93.068.200	93.068.200	-	Kota Pasuruan	DAU					97.721.610	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	276.650.050	272.726.450	256.326.050	-20.324.000	Kota Pasuruan	DAU					286.362.773	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM//KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	**100%**	**100%**	144.350.500	156.040.000	117.608.000	-26.742.500							163.842.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.370.000	44.370.000	32.888.000	-9.482.000	Kota Pasuruan	DAU					46.588.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	7 Unit	55.500.000	70.160.000	47.800.000	-7.700.000	Kota Pasuruan	DAU					73.668.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	40 Unit	19 Unit	17.080.500	12.110.000	7.520.000	-9.560.500	Kota Pasuruan	DAU					12.715.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantro dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	29.400.000	29.400.000	29.400.000	-	Kota Pasuruan	DAU					30.870.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**10%**	**10%**	**1.035.892.600**	**988.007.000**	**796.611.500**	-261.583.700							**1.037.407.350**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan penanganan konflik	**3%**	**3%**	**1.035.892.600**	**988.007.000**	**796.611.500**	-261.583.700							**1.037.407.350**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 orang	60 orang	26.889.900	25.968.500	6.488.600	-20.401.300	Kota Pasuruan	DAU					27.266.925	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan	1 laporan	16.196.900	15.653.000	6.538.600	-9.658.300	Kota Pasuruan	DAU					16.435.650	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan PASKIBRAKA	Jumlah PASKIBRAKA	75 orang	74 orang	992.805.800	946.385.500	783.584.300	-209.221.500	Kota Pasuruan	DAU					993.704.775	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik	**20%**	**20%**	1.264.582.000	1.501.370.400	1.347.720.700	-83.138.700							1.576.438.920	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM//KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pemilih pemula yang dibina	**255 orang**	**255 orang**	1.264.582.000	1.501.370.400	1.347.720.700	-83.138.700							1.576.438.920	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	1.244.638.100	1.244.638.100	1.235.458.200	-9.179.900	Kota Pasuruan	DAU					1.306.870.005	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situas	60 Orang	106 Orang	19.943.900	256.732.300	112.262.500	-92.318.600	Kota Pasuruan	DAU					269.568.915	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	**3%**	**3%**	345.141.200	105.203.200	428.322.700	-83.181.500							110.463.360	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	**40%**	**40%**	345.141.200	105.203.200	428.322.700	-83.181.500							110.463.360	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	185 orang	510 orang	317.838.100	79.123.800	217.890.500	-99.947.600	Kota Pasuruan	DAU					83.079.990	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40 orang	95 orang	15.595.900	15.595.900	206.912.600	191.315.700	Kota Pasuruan	DAU					16.375.695	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	11.707.200	10.483.500	3.519.600	8.187.600	Kota Pasuruan	DAU					11.007.675	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM//KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase lembaga ekonomi,sosial dan budaya yang aktif	**20%**	**20%**	498.548.800	384.477.300	217.626.700	-280.922.100							403.701.165	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	**85%**	**85%**	498.548.800	384.477.300	217.626.700	-280.922.100							403.701.165	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 Orang	30 Orang	65.605.100	12.786.900	6.560.000	-59.045.100	Kota Pasuruan	DAU					13.426.245	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	160 Orang	422.680.500	365.299.400	208.325.600	-214.354.900	Kota Pasuruan	DAU					383.564.370	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.263.200	6.391.000	2.741.100	-7.522.100	Kota Pasuruan	DAU					6.710.550	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik yang dimediasi	**75%**	**75%**	1.633.034.900	1.735.185.900	1.987.590.400	354.555.500							1.821.945.195	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan penanganan konflik	**3%**	**3%**	1.633.034.900	1.735.185.900	1.987.590.400	354.555.500							1.821.945.195	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konf	1260 orang	3750 orang	1.386.302.000	1.334.842.300	1.773.767.500	-387.465.500	Kota Pasuruan	DAU					1.401.584.415	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM//KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yaitu melakukan kegiatan pemantauan orang asing, TKA asing dan lembaga asing	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	1 laporan	1 laporan	173.397.500	254.928.700	85.765.200	-87.632.300	Kota Pasuruan	DAU					267.675.135	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	73.335.400	145.414.900	128.057.700	54.722.300	Kota Pasuruan	DAU					152.685.645	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) adalah penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat program kegiatan selama tahun 2025 dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 merupakan perencanaan program dan kegiatan tahun ke empat dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021 – 2025 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya.

Berdasarkan program dan kegiatan yang sedang dalam proses dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan masih perlu ditingkatkan koordinasi yang efektif dan efisien dari pelaksana program dalam rangka mewujudkan tim yang solid demi kelancaran dan kesuksesan program dan kegiatan tersebut. Untuk ketersediaan dana yang kurang sesuai dengan kebutuhan menjadi kendala tersendiri yang mana dengan keterbatasan dana, kegiatan harus tetap terlaksana sesuai dengan tujuan dan tepat pada sasaran. Selain itu, adanya beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik kegiatan berkelanjutan yang terpaksa dihapus maupun kegiatan baru yang harus segera dilaksanakan perlu disikapi secara bijaksana oleh pelaksana program/kegiatan.

Mengacu pada catatan penting di atas, maka perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka program pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang beserta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dengan sebaik–baiknya dan penuh tanggung jawab demi terpenuhinya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026;
3. Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan, Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengacu pada P-RKPD Kota Pasuruan dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, RPJMD dan RPJPD Kota Pasuruan.

Dari uraian di atas, rencana tindak lanjut yang dibutuhkan antara lain perlu adanya evaluasi dan perencanaan terhadap program/kegiatan agar pelaksanaan berikutnya lebih matang, peningkatan koordinasi intern dari para pelaksana kegiatan, dan penambahan jumlah pagu indikatif untuk mengantisipasi lonjakan harga dalam rangka inflasi dengan menyesuaikan jenis kegiatan. Selain itu, perlu dikaji ulang untuk lebih fokus dalam mewujudkan visi dan misi Kota Pasuruan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga program dan kegiatan pada perencanaan berikutnya selaras dengan visi dan misi tersebut.

Demikian dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas – tugas yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

Pasuruan, 25 Juni 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pasuruan

Drs. H. MOKHAMAD FAQIH, M.si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013